

PBG Instrumen Penting Wujudkan Keselamatan Umum Bangunan

SLEMAN (KR) - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan *public safety* atau keselamatan umum suatu bangunan. Sehingga penting untuk memastikan tahapan telah sesuai prosedur yang benar. Seiring dinamika ke depan perlu juga diperhatikan aspek *sustainability* bangunan atau arsitektur berkelanjutan.

“Salah satu untuk *public safety* yaitu dengan PBG yang benar, *public safety* itu tidak ada toleransi,” ungkap Ir Steffie Gumilar dari TPA Jakarta Utara saat menjadi pemateri Workshop dan Short Course Penyusunan PBG yang diselenggarakan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Komda DIY di Eastparc Hotel Depok Sleman, Selasa (10/12). Menurutnya, dalam penyusunan PBG dibutuhkan

kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan pemohon. Kendala yang kerap dihadapi di lapangan di antaranya Tim Penilai Ahli (TPA) yang berlebihan atau bisa jadi lantaran konsultan tak profesional. Sehingga perlu sosialisasi terkait penyusunan PBG yang efektif. “Oleh karena itu perlu adanya suatu standar dan pengetahuan. Salah satunya dengan digelar work-

shop seperti ini, bagi para pemohon disarankan untuk bisa memilih konsultan yang baik,” ujar Steffie. Narasumber lain Umi Akhsanti ST MT menjelaskan, PBG merupakan bagian perlindungan bagi masyarakat, baik sebagai pengguna bangunan atau sebagai yang terdampak atas keberadaan bangunan. “Kesadaran masyarakat di wilayah Kota Yogya untuk melakukan pengurusan



KR-Istimewa

Moch Arif Toto Rahardjo (kanan) bersama Ketua HAKI Komda DIY Dr Ir Hery Kristiyanto ST MT IPM, Kepala Dinas DPUPKP Yogya Umi Akhsanti dan Neli Iswari mengunjungi salah satu stan pameran.

PBG, sudah cukup tinggi,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

(DPUPKP) Kota Yogyakarta ini. Ditambahkan, diiperlukan panduan pelaksanaan

untuk mengoperasikan Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) agar proses penerbitan PBG dapat berjalan dengan baik. Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan Ir Moch Arif Toto Rahardjo didampingi Neli Iswari selaku Marketing Executive Komda HAKI DIY menyebut, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan teknis terkait proses penyusunan PBG secara benar, cukup tinggi. Hal ini penting guna memastikan kualitas dan keselamatan bangunan. Antusiasme itu tampak dalam penyelenggaraan Workshop yang akan berlangsung hingga 12 Desember

nanti. “Peserta per hari ini 170 orang. Target pesimis 150, ternyata melebihi jadi 170 orang, di luar peserta dari sponsor,” kata Toto. Workshop juga diikuti oleh sejumlah perusahaan besar di industri konstruksi, di antaranya PT Kuda-Kuda Total Prima (Giga Steel), PT Garuda Yamato Steel, PT Fumira, PT Horse Teknologi Indonesia, PT Aneka Sakti Bhakti (ASABA), PT Kencana Maju Bersama, PT Hutama Karya (Persero), PT Robertson Fastbuild Indonesia, PT Nindya Karya, PT Bersama Bangun Persada (Fisher), PT Suprajaya dan PT Wijaya Karya Beton Tbk. **(Has)-f**

SEPANJANG TAHUN 2024

Bapemperda Selesaikan 14 Rancangan Peraturan Daerah



Budi Sanyata SPd

SLEMAN (KR) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sleman telah menyelesaikan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sepanjang Tahun 2024. Dari 14 raperda,

Raperda Penanggulangan Stunting serta Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika menjadi perhatian khusus DPRD Kabupaten Sleman.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman Budi Sanyata SPd mengatakan, dari 14 raperda yang dibahas Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman, lima di antaranya merupakan inisiatif dewan. Sedangkan lima lainnya usulan dari bupati atau pemerintah daerah selaku eksekutif.

“Sepuluh raperda tersebut menjadi program pembentukan peraturan daerah (propemperda) antara eksekutif dan legislatif,” kata Budi.

Kemudian ada 3 raperda yang juga tuntas pembahasannya bersifat kumulatif terbuka. Yakni Pertanggungjawaban Pe-

laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman.

“Meski raperda ini bukan termasuk propemperda, pembahasannya juga telah rampung. Artinya, Bapemperda tak lagi punya utang raperda yang harus dilanjutkan pembahasannya pada 2025,” ucap politisi dari PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, dari seluruh raperda yang telah selesai dibahas hanya satu yang masih dalam tahap fasilitasi gubernur. Yakni Raperda Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Hal itu dikarenakan saat ini masih menunggu surat pengakhiran dari masing-masing BKM yang ada di seluruh Kabupaten Sleman. “Raperda yang lain semuanya sudah dalam proses pengajuan nomor registrasi ke gubernur,” terangnya.

Dikatakan, 14 raperda yang telah selesai dibahas semuanya penting. Namun ada dua raperda yang mendapat perhatian khusus dari DPRD Kabupaten Sleman. Yakni Raperda Penanggulangan Stunting serta Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.



Budi Sanyata saat memimpin rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman

KR-Istimewa

“Terlebih keduanya merupakan propemperda inisiatif DPRD Kabupaten Sleman. Penanggulangan stunting adalah program nasional sehingga kami wajib mendukungnya,” kata politikus dari Maguwoharjo Depok ini.

Dalam proses pembahasannya, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penanggulangan Stunting dan tim dari eksekutif sempat mempertimbangkan perlu tidaknya pembentukan lembaga baru khusus pencegahan dan penanggulangan stunting. Tujuannya mengejar target dari pemerintah pusat yang menoleransi angka stunting hingga di bawah lima persen. Selain itu, pansus menegaskan perlunya muatan lokal yang lebih di-

tekankan untuk mendukung tercukupinya makanan bergizi dan pola asuh anak.

“Dari dua penekanan tersebut, fokus utamanya justru pada pola asuh anak. Sebab, kondisi lapangan menunjukkan bahwa angka stunting tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Banyak pula anak stunting berasal keluarga menengah ke atas. Bahkan, anak stunting dari keluarga miskin hanya delapan persen,” paparnya.

Sedangkan mengenai Raperda Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, lanjut Budi, mendapat atensi karena berkaitan dengan upaya pemerintah menciptakan generasi emas tahun berikutnya. “Penyalahgu-

naan narkoba ini masalah klasik. Sehingga harus dikawal terus secara berkesinambungan dan melibatkan semua pihak,” tuturnya.

Budi menegaskan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Raperda P4GN dan Prekursor Narkotika disusun dan dibahas untuk disahkan lebih untuk mempertegas perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba.

“Hal itu demi memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap warga Kabupaten Sleman dari segala bentuk tindak penyalahgunaan narkoba,” pungkas Budi. **(Sni)**

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024		
No	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA/INISITATIF
1	Badan Keswadayaan Masyarakat	DPRD
2	Penanggulangan Stunting	DPRD
3	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPRD
4	Penyelenggaraan Metrologi	Bupati
5	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika	DPRD
6	Pendidikan Karakter	DPRD
7	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman	Bupati
8	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman	Bupati
9	Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman	Bupati
10	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada	Bupati



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI C DPRD KABUPATEN SLEMAN

2025, Jalan Mulus dan Jalan Terang



KR-Istimewa

Suryana AMdKes

SLEMAN (KR) - Komisi C DPRD Kabupaten Sleman mendorong kepada eksekutif untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Salah satunya mewujudkan jalan mulus dan jalan terang di sepanjang Jalan Kabupaten Sleman. Dengan infrastruktur yang bagus, diharapkan ekonomi masyarakat akan meningkat.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Suryana

AMdKes mengatakan, sekarang ini masih ada beberapa ruas jalan di Kabupaten yang rusak dan minim Penerangan Jalan Umum (PJU). Bahkan setiap turun ke lapangan, keluhan jalan rusak dan minim penerangan sering menjadi sorotan masyarakat.

“Setiap ada pertemuan dengan masyarakat, keluhan jalan berlubang dan jalan yang gelap, sering disampaikan. Tentu ini akan menjadi perhatian Komisi C DPRD Kabupaten Sleman,” kata Suryana.

Bahkan tak heran, warga memasang tulisan maupun menanam pisang di jalan yang rusak. Hal itu sebagai bentuk protes atau sindirian kepada pemerintah daerah terhadap kondisi jalan di Kabupaten Sleman. “Masyarakat melakukan aksi itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Bahwa jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki,” kata politisi dari Mlati ini.

Dengan kondisi jalan yang

rusak itu cukup membarhayakan bagi pengguna jalan karena rawan terjadi kecelakaan. Kemudian jalan yang gelap juga rawan terjadi aksi kejahatan seperti jambret maupun klithih. “Sudah banyak buktinya, jalan yang rusak atau berlubang sangat rawan kecelakaan lalu lintas. Apalagi di jalan tersebut minim penerangan. Selain rawan kecelakaan, jalan yang gelap juga sering terjadi aksi kejahatan,” kata anggota legislatif dari Fraksi Golkar.

Untuk itu, Suryana mendorong kepada eksekutif supaya memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Utamanya perbaikan jalan yang rusak atau berlubang, serta memperbanyak penerangan jalan. “Kami minta Tahun 2025, jalan mulus dan jalan terang. Artinya sudah tidak ada jalan yang berlubang dan gelap,” tegas pria yang juga berprofesi sebagai bong supit ini.

Suryana berharap, jika jalan rusak yang menjadi do-



KR-Istimewa

Komisi C saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Madiun.

main pemerintah daerah (jalan kabupaten) harus sudah dipetakan sejak sekarang. Namun jika bukan kewenangan Pemkab Sleman, harus segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, provinsi maupun kalurahan.

“Jika bukan menjadi kewenangannya, pemerintah kabu-

paten tinggal berkoordinasi dengan pemangku kepentingan masing-masing. Misalnya pemerintah pusat, provinsi, maupun kalurahan,” pintanya.

Dengan kondisi jalan yang mulus dan terang, diharapkan dapat memperlancar perekonomian daerah. Selain itu juga

mendukung kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Sleman. “Jalan yang mulus dan terang, tentu akan memperlancar aksesibilitas dan aktivitas masyarakat. Jika sektor ekonomi meningkat, diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. **(Sni)-f**